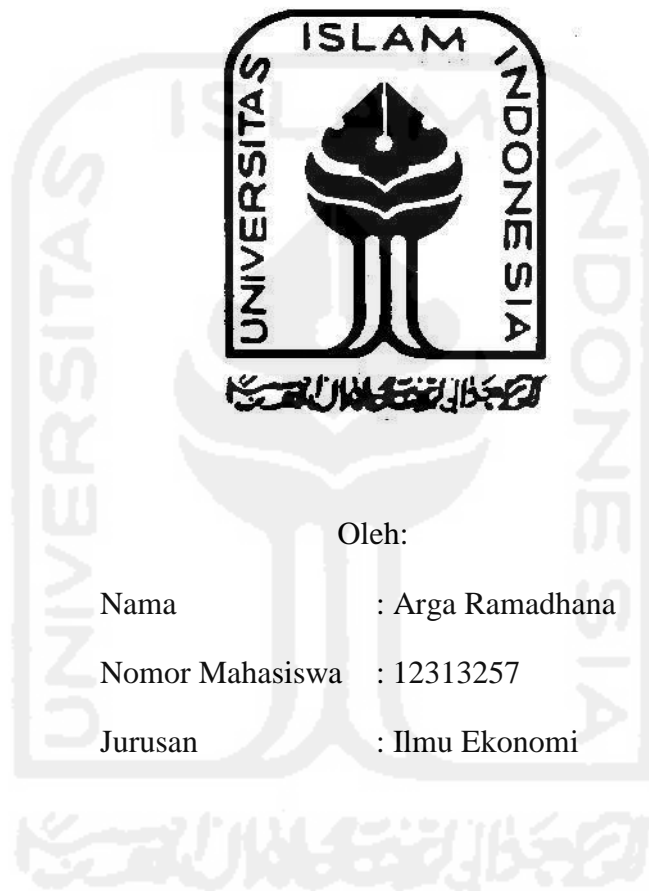


**JURNAL**  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**  
**ANGGARAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Arga Ramadhana

Nomor Mahasiswa : 12313257

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2016**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
ANGGARAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**

Arga Ramadhana – 12313257

Fakultas Ekonomi, Univeritas Islam Indonesia

Email: arghabosi@gmail.com

**ABSTRAK**

Anggaran pertahanan adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata. Tujuan dari pengeluaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga Negara.

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, CEIC, internet, ataupun publikasi lainnya yang terdiri dari data jumlah anggaran pertahanan, pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemampuan keuangan Negara (APBN) dan kepadatan penduduk. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (time series data) untuk kurun waktu 1999 – 2014.

Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model penyesuaian parsial (*Partial adjustment model* atau PAM). Penelitian ini juga menggunakan uji t, uji F, dan uji asumsi klasik baik uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran pertahanan dalam jangka pendek dan jangka panjang, Kemampuan keuangan Negara (APBN) berpengaruh negatif terhadap anggaran pertahanan jangka pendek dan jangka panjang, dan kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap anggaran pertahanan jangka pendek dan jangka panjang.

**Kata Kunci : Anggaran Pertahanan, *Partial adjustment model* (PAM)**

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal dengan jumlah penduduk yang terus bertambah tiap tahunnya. Berdasarkan data Departemen Perdagangan AS, melalui sensus penduduknya, pada tahun 2014 Indonesia berada di posisi ke-4 dari peringkat negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Total jumlah penduduk Indonesia mencapai 253,60 juta jiwa.

Letak geografisnya yang strategis, sehingga Indonesia memiliki potensi ancaman yang kedepannya akan semakin kompleks. Sementara itu, di sisi lain stabilitas keamanan nasional belum kuat. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini makin bersifat multi dimensional seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, Indonesia diharuskan untuk dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI (2007), terdapat enam faktor yang mempengaruhi pertahanan nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pertahanan yaitu: (1) anggaran pertahanan; (2) jumlah penduduk suatu negara; (3) ancaman konvensional dan non konvensional; (4) anggaran pertahanan negara lain; (5) kemampuan keuangan pemerintah; (6) harga alutsista; dan (7) jumlah personil sistem pertahanan.

Berdasarkan data Internasional Maritime Bureau (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001 dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia "Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21", terdapat 213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia dan kawasan Samudera Hindia, 91 kasus diantaranya terjadi di perairan Indonesia. Namun data pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh TNI-AL, menyatakan bahwa selama tahun 2001 terjadi 61 kasus yang murni dikategorikan sebagai aksi pembajakan dan perompakan dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Dari data yang dirilis kedua institusi diatas, terdapat perbedaan angka, namun data tersebut menunjukkan bahwa keamanan perairan Indonesia pada dekade terakhir memiliki ancaman dan gangguan keamanan yang cukup serius dan perlu penanganan secepat mungkin.

Selain isu diatas, isu perbatasan antar negara juga menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki sepuluh negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste. Misalnya saja masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yaitu penentuan batas maritim Indonesia -Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara.

Terlaksananya kemampuan pertahanan negara membutuhkan daya dukung anggaran. Pada dasarnya Anggaran merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari pengeluaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Hutosait, 2012) .

Di Indonesia sendiri, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian lain untuk pagu anggaran 2014. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mengalokasikan Rp 83,4 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Pengalokasian untuk anggaran pertahanan ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Dari uraian diatas serta pemikiran diatas maka penulis merasa terdorong untuk mendalami dan meneliti tentang “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pertahanan Di Indonesia Pada Tahun 1999 -2014”

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Anggaran Pertahanan**

Pada dasarnya Anggaran merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dalam Nota Keuanagterdapat uraian – uraian yang sangat jelas terkait Anggaran militer (atau pengeluaran militer), juga dikenal dengan anggaran pertahanan adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatau negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata. Anggran militer seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suata negara terhadap ancaman dari pihak lain. Anggran pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat besar untuk negara (Wikipedia.org).

Tujuan dari pengeluaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia). Menurut Adam Smith tugas melindungi masyarakat perlu dilakukan oleh kekuatan pertahanan yang merupakan kewajiban pertama.

Menurut Kunio (1999:17), pengeluaran belanja militer merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran yang digunakan dalam sistem pertahanan sebuah Negara. Perbelanjaan militer merupakan suatu yang sangat penting bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dan menjadi sangat penting bagi setiap negara untuk menjaga sistem pertahanan negaranya (SIPRI).

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2003).

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*) dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$g = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

- g : Pertumbuhan ekonomi
- $y_t$  : Produk domestik bruto tahun sekarang
- $y_{t-1}$  : Produk domestik bruto tahun yang lalu

## 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak banyak dipersoalkan. Yang banyak dipersoalkan adalah jumlah atau komposisi angka-angka yang

tercantum didalamnya dari pada sifat hukum (rechtskarakter) dari Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Bahori, 1995: 15).

Pendapatan Negara dan hibah terdiri dari: 1) Penerimaan Dalam Negeri yaitu pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 2) hibah yaitu bersifat bilateral dan multilateral. Sedangkan pembiayaan bersumber dari: 1) non utang, dan 2) utang, dengan proporsi yang bervariasi dalam setiap tahunnya.

Anggaran belanja negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan ketiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu alokasi sumber daya, stabilisasi, serta distribusi. Fungsi alokasi diterjemahkan dalam bentuk pengalokasian dana melalui anggaran belanja negara untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, salah satunya adalah untuk pertahanan Negara.

#### **4. Teori Kepadatan Penduduk**

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi kualitas hidup manusia atau masyarakat, diantaranya adalah kepadatan penduduk, ketersediaan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Negara untuk kesejahteraan masyarakat, pola hidup yang dianut oleh masyarakat, norma yang berlaku di suatu daerah dan lain-lain.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Ida Bagoes Mantra, 2007). Jumlah penduduk setiap satu Km<sup>2</sup> atau setiap 1 mil<sup>2</sup> adalah ukuran yang biasa digunakan.

Persebaran yang tidak merata merupakan permasalahan dalam kepadatan penduduk. Usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan pada daerah yang kepadatannya tinggi. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, Keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan.

Menurut Christiani, Tedjo dan Martono (2014), Ledakan penduduk yang cepat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat. Adapun dampak dari ledakan penduduk adalah :

- a. Semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, yang layak). Akibatnya sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak lagi sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk.
- b. Tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan yang ada (sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi) serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan lain.

- c. Tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada, akibatnya terjadilah peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak pada menurunnya kualitas sosial (banyak tuna wisma, pengemis, kriminalitas meningkat dan lain-lain).

Rumus kepadatan penduduk yaitu Jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Contohnya :  $400 \text{ jiwa} : 4 \text{ Km}^2 = 100/\text{Km}$ . Jadi setiap  $1 \text{ Km}^2$  hanya boleh terdapat 100 jiwa penduduk saja.

## **METODOLOG PENELITIAN**

### **1. Devinisi Variabel**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa variabel yang mempengaruhi Anggaran Pertahanan di Indonesia, yaitu :

1. Anggaran Pertahanan (Y) adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata (Miliar rupiah). Data diperoleh dari Buku Statistik Indonesia diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dalam berbagai tahun penerbitan.
2. Pertumbuhan ekonomi (X1) adalah proses kenaikan total output dalam jangka panjang (persen). Data diperoleh dari CEIC. Dimana pertumbuhan ekonomi disini menggunakan PDRB dengan tahun dasar 2010.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (X2) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penelitian ini peneliti mengambil total anggaran pendapatan Negara (miliar rupiah). Dalam penelitian ini, penulis mengambil data total Anggaran Pendapatan Negara. Data diperoleh dari Buku Statistik Indonesia diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dalam berbagai tahun penerbitan. Selain itu, data juga diperoleh dari Nota Keuangan Negara berbagai tahun penerbitan.
4. Kepadatan Penduduk (X3) adalah perbandingan dari jumlah penduduk dibagi dengan jumlah luas wilayah (jiwa/km<sup>2</sup>). Data diperoleh dari Buku Statistik Indonesia diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dalam berbagai tahun penerbitan

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, internet, ataupun publikasi lainnya yang terdiri dari data jumlah anggaran pertahanan, pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemampuan keuangan Negara (APBN) dan kepadatan penduduk. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (time series data) untuk kurun waktu 1999 – 2014.

### 3. Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan model penyesuaian parsial atau *Partial Adjustmnt Model* (PAM). Selain dengan menggunakan model penyesuaian adaptif, teori yang bisa menjelaskan tentang kelambaman geometrim adalah model penyesuaian persediaan (*stock*) atau model penyesuaian parsial (*Partial Adjustmnt Model*) disingkat PAM (Widarjono, 2007; 233-234).

Model Penyesuaian Parsial (PAM) merupakan model dinamik, yang mengasumsikan keberadaan suatu hubungan *equilibrium* jangka panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi. Model PAM dapat meliputi lebih banyak variabel dalam menganalisis fenomena ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang serta mengkaji konsisten atau tidaknya model empiris dengan teori ekonomi (Insukindro, 1990). Namun yang terjadi dalam jangka pendek adalah *disequilibrium*. Dengan mekanisme penyesuaian parsial, proporsi *disequilibrium* pada suatu periode dikoreksi pada periode berikutnya. Berlandaskan konsep ini, hubungan jangka panjang menjadi dapat diestimasi melalui hubungan jangka pendek (Insukindro, 1990).

Untuk menjelaskan berapa tingkat optimal persediaan, berikut model sederhana optimal persediaan sebagai berikut (Widarjono, 2007; 233-234):

$$\log Y_t^* = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1t} + \beta_2 \log X_{2t} + \beta_3 \log X_{3t} + \epsilon_t \quad (3.1)$$

Di mana :

$Y_t^*$  = Persediaan optimal atau keseimbangan Anggaran Pertahanan Republik  
Indonesia

$B_0$  = Konstanta

$B_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_2$  = Kemampuan Keuangan Negara (APBN)

$X_3$  = Kepadatan Penduduk

$\epsilon_t$  = Error Term



Model diatas menjelaskan bahwa persediaan optimal dipengaruhi oleh X1, X2 dan X3. Nilai dari persediaan optimal  $Y_t^*$  tidak bisa diobservasi hanya diprediksi. Salah satu memperdiksinya yaitu melalui *Partial Adjustmnt Model* (PAM). Jika  $Y_t^*$  adalah persediaan optimal pada periode t dan  $Y_t$  adalah nilai actual persediaan, maka model PAM sebagai berikut:

$$Y_t - Y_{t-1} = \delta (Y_t^* - Y_{t-1}) \quad (3.2)$$

Dimana :

$\delta$  : Koefisien penyesuaian yang besarnya  $0 < \delta < 1$  ;  $Y_t - Y_{t-1}$  = perubahan persediaan actual

$Y_t^* - Y_{t-1}$  : Perubahan persediaan yang diinginkan,

Persamaan (3.2) menyatakan bahwa perubahan actual pada periode t sebesar  $\delta$  dari persediaan yang diinginkan pada periode tersebut. Pada umumnya nilai  $\delta$  akan terletak pada nilai 0 dan 1 karena penyesuain persediaan menuju tingkat keseimbangan tidaklah sempurna.

Penyesuaian persamaan (3.2) dapat ditulis kembali menjadi persamaan sebagai berikut:

$$Y_t = \delta Y_t^* + (1 - \delta) Y_{t-1} \quad (3.3)$$

Dalam persamaan (3.3) ini menjelaskan bahwa persediaan yang actual periode t merupakan rata-rata tertimbang dari persediaan actual yang diinginkan dan persediaan actual pada periode sebelumnya dimana timbangnya masing-masing sebesar  $\delta$  dan  $(\delta-1)$ .

Untuk mencari solusi pada persamaan (3.1) maka kita dapat mendistribusikan persamaan (3.1) kedalam persamaan (3.3). Dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut:

$$\text{Log}Y_t = \beta_0 + \beta_1 \log X1_t + \beta_2 \log X2_t + \beta_3 \log X3_t + \beta_4 \log Y_{t-1} \quad (3.4)$$

## HASIL DAN ANALISIS

Tujuan dari regresi ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi(X1), kemampuan keuangan Negara(APBN)(X2), kepadatan penduduk(X3) terhadap Anggaran Pertahanan Indonesia (Y). Penelitian ini menggunakan model penyesuaian parsial (*Partial adjustment model* atau PAM).

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan model penyesuaian parsial atau *Partial Adjustmnt Model* (PAM). Model Penyesuaian Parsial

(PAM) merupakan model dinamik, yang mengasumsikan keberadaan suatu hubungan *equilibrium* jangka panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi.

Setelah melakukan regresi pada Eviews 8, maka diperoleh hasil tersebut dan kita dapat menuliskan dalam persamaan fungsi jangka pendek sebagai berikut :

$$Y_t = 92.79260 + 0.040692 X_{1t} - 1.592772 X_{2t} + 24.0567650 X_{3t} + 0.567650 \log Y_{t-1}$$

Koefisien penyesuaiannya sebesar  $\delta = 1 - 0.5676 = 0,4324$  yang berarti bahwa perbedaan sebesar 0,4324 antara jumlah anggaran pertahanan yang diinginkan dengan yang terjadi disesuaikan dalam periode tahunan. Untuk mencari jangka panjang dapat membagi hasil jangka pendek dengan  $\delta = 0,4324$ . Hasilnya sebagai berikut:

Tabel Hasil Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Variabel	Jangka Pendek	Jangka Panjang
$Y_{kt}$	-92.79260	- 214, 5989
$X_{1t}$	0.040692	0,0941
$X_{2t}$	-1.592772	-9,8440
$X_{3t}$	24.06571	55,6561

Hasil tersebut diperoleh/dihitung dari koefisien jangka pendek dibagi dengan  $\delta = 0,4324$ . Sehingga penyesuaian jangka panjang menjadi:

$$Y_t^* = - 214, 5989 + 0,0941X_1 + -9,8440X_2 + 55,6561X_3.$$

$R^2$  dalam regresi sebesar 0.922521. artinya bahwa 92,25 % variabel anggaran pertahanan dapat dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi, kemampuan keuangan Negara, kepadatan penduduk. sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Selanjutnya, peneliti melakukan uji t. maksudnya adalah pengujian yang dilakukan dengan cara menguji masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara individu variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

**a. Uji t terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Nilai uji t tabel satu sisi dengan derajat kebebasan 11 dan  $\alpha = 5\%$ , maka dapat diperoleh nilai sebesar 1,796. Sedangkan, untuk nilai t-hitung sebesar 0.267544. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa t hitung < t kritis, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara individu variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran pertahanan Republik Indonesia.

**b. Uji t terhadap variabel Kemampuan Keuangan Negara (APBN)**

Nilai uji t tabel satu sisi dengan derajat kebebasan 11 dan  $\alpha = 10\%$ , maka dapat diperoleh nilai sebesar 1,363. Sedangkan, untuk nilai t-hitung sebesar -1.757839. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa t hitung > t kritis, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara individu variabel Kemampuan Keuangan Negara (APBN) berpengaruh terhadap anggaran pertahanan Republik Indonesia.

**c. Uji t terhadap variabel Kepadatan Penduduk di Indonesia**

Nilai uji t tabel dua sisi dengan derajat kebebasan 11 dan  $\alpha = 5\%$ , maka dapat diperoleh nilai sebesar 1,796. Sedangkan, untuk nilai t-hitung sebesar 2.326945. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa t hitung > t kritis, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara individu variabel Kepadatan penduduk di Indonesia berpengaruh terhadap Anggaran pertahanan republik Indonesia

Dalam uji F. Nilai F tabel pada  $\alpha = 5\%$  dengan df numerator  $(k-1) = 4$ , dan df denominator  $(n-k) = 11$ , maka dapat diperoleh nilai F tabel sebesar 3,36. Sedangkan untuk nilai F hitung diperoleh sebesar 29.76682. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen mampu berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Pertahanan Republik Indonesia.

Pada Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Dan hasilnya adalah bahwa penelitian ini tidak mengandung multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

**Interpretasi Hasil**

Dalam analisis ini menyatakan bahwa variabel-variabel penelitian yang diduga mempengaruhi Anggaran Pertahanan Indonesia dan diuji dengan menggunakan data selama 16 tahun observasi, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 adalah Pertumbuhan Ekonomi, Kemampuan keuangan Negara (APBN), dan Kepadatan Penduduk. Pengaruh variabel-variabel penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil estimasi model dinamis PAM terhadap anggaran pertahanan diperoleh  $R^2$  sebesar 0.922521 ini menunjukkan bahwa 9,25% variabel dependen anggaran pertahanan dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent Pertumbuhan Ekonomi, Kemampuan keuangan Negara (APBN), dan Kepadatan Penduduk baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pada penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh terhadap anggaran pertahanan dalam jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia. Hal ini dibuktikan

bahwa  $t$  hitung  $< t$  kritis, sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa secara individu variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran pertahanan Republik Indonesia. Kondisi ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan anggaran pertahanan. Menurut Biswas & Ram (1986) (dalam Hutosa, 2012), pengeluaran pertahanan dapat saja memberikan efek negatif maupun positif dengan pertumbuhan pada waktu tertentu dan kondisi tertentu. Pengeluaran pertahanan tidak konsisten mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara statistik dengan signifikan. Negara yang terbukti anggaran pertahannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Pengeluaran Militer Korea Selatan tinggi dan pertumbuhan ekonominya pun ikut meningkat. Sedangkan keadaan berbeda terjadi di Uni Soviet, pengeluaran militer tinggi tetapi pertumbuhan ekonominya tetap rendah.

Dalam jangka pendek kemampuan keuangan Negara (APBN) ( $X_2$ ) sebesar -1,5927. Ini berarti ketika kemampuan keuangan negara (APBN) naik sebesar 1 persen, maka anggaran pertahanan akan mengalami penurunan sebesar 1,5927 persen dan sebaliknya sedangkan jangka panjang sebesar -9,8440 menunjukkan bahwa dalam jangka panjang perubahan kemampuan keuangan negara (APBN) berpengaruh terhadap anggaran pertahanan yakni kenaikan kemampuan keuangan negara (APBN) sebesar 1 persen akan menurunkan anggaran pertahanan optimum sebesar 9,8440 persen. Hal ini dikarenakan alokasi keuangan tidak berfokus pada pertahanan. Dalam Nota Keuangan Republik Indonesia, Anggaran pertahanan memang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun anggaran pertahanan persentasinya lebih kecil dari yang lain. Alokasi keuangan Negara dalam lima tahun terakhir lebih kearah pelayanan publik, ekonomi, dan pendidikan. Pada tahun 2014, anggaran untuk pelayanan publik, ekonomi, dan pendidikan secara berurutan sebesar 856.118 miliar rupiah, 113.986 miliar rupiah, 126.249 miliar rupiah. Sedangkan anggaran untuk sector pertahanan hanya sebesar 83.221 miliar rupiah (Nota Keuangan Republik Indonesia 2015).

Variabel kepadatan penduduk ( $X_3$ ) terbukti signifikan. artinya semakin tinggi angka kepadatan penduduk maka maka anggaran pertahanan semakin meningkat begitupula sebaliknya. Koefisien regresi jangka pendek 24,0657, maka kenaikan angka kepadatan penduduk sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan anggaran pertahan sebesar 24,0657 persen. Dan dalam jangka panjang kenaikan angka kepadatan penduduk sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan anggaran pertahan optimum sebesar 55,6561 persen. Artinya dalam jangka panjang meningkatnya kepadatan penduduk sebesar 1 persen akan menaikkan anggaran pertahanan Republik Indonesia. Tujuan dari pengeluaran militer adalah menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi Negara beserta teritorialnya (state interest and territory), dan

keamanan bagi para warga (Hutasoit, 2012). . Dengan demikian, ketika kepadatan penduduk meningkat, maka tingkat keamanan perlu diperhatikan. Sektor pertahanan akan mengeluarkan anggaran dalam hal ini untuk penambahan persenil keamanan, dan lain lain agara tercipta keamanan bagi warga Negara.

## **KESIMPULAN**

1. Variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terbukti berpengaruh terhadap anggaran pertahanan dalam jangka pendek dan jangka panjang di Indonesia.
2. Variabel kemampuan keuangan Negara (APBN) terbukti signifikan dan negatif bagi anggaran pertahanan Republik Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kemampuan keuangan Negara (APBN) meningkat, maka berpengaruh negatif terhadap anggaran pertahanan. Dikarenakan Alokasi keuangan Negara lebih kearah pelayanan publik, ekonomi, dan pendidikan.
3. Variabel Kepadatan penduduk terbukti signifikan dan positif bagi anggaran pertahanan Republik Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. ketika kepadatan penduduk meningkat, maka tingkat keamanan perlu diperhatikan. Sektor pertahanan akan mengeluarkan anggaran dalam hal ini untuk penambahan persenil keamanan, dan lain lain agara tercipta keamanan bagi warga Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Wijaya., Hasan, MDDA., Suryanto, J., & Darman, DA. (2007). *Kebutuhan Dana Pengembangan Pertahanan nasional, BAB IV. Analisis Anggaran Pertahanan*, hlm.58. Jakarta: Lipi Press
- Badan Puat Statistik (2013). *Statsitik Indonesia( Statistical Yearbook of Indonesiaia 2013)*, Katalog 1101001
- Balla, Atill (2000), "Factors Influencing Defense Expenditures – A Hungarian Perspective", Thesis (Unpublished), Master of Science in International Resource Planning an Management, Naval Postgraduate School. California.
- Christiani, Tedjo, & Martono (\_\_\_\_\_), " Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi jawa Tengah" *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*.
- Departemen Keuangan. 2004. *Nota Keuangan RAPBN 2005*. Jakarta.
- Departemen Pertahanan. 2003. *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*. Buku Putih

- Gujarati, Damodar. 1991. *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan oleh Sumarno Zain. Jakarta : Erlangga
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonomika Dasar* : Edisi ke-enam. Jakarta : Erlangga
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika*, (3rd ed), jilid 2, Terjemahan oleh Julius A. Mulyadi. Jakarta : Erlangga.
- Hutasoit. J.K (2012) , “ Guns Versus Butter : Upaya Peningkatan Anggaran Milite untuk Peningkatan Kesejahteraan”, Program Pascasarjana Iniversitas Kristen Indonesia, Jakarta.
- Kunio, Yoshihara. 1999. *Building a Prosperous Southeast Asia: from ersatz to echt capitalism*. Dalam Caroline Simatupang, *Perbelanjaan Ketenteraan Indonesia Selepas Krisis Ekonomi 1997*, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 2008.
- Insukindro. 2006. *Ekonomi Uang dan Bank : Teori dan Pengalaman Indonesia*. Yogyakarta : BPF-UGM
- Laksmna. A (2010), “Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’ : Tantangan dan Prospek ke Depan” *Jurnal Indonesian Review*, Volume 1, Agustus 2010.
- Purwanto, adi (2010), “Peningkatan Anggaran Militer Cina Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Di Asia Timur” vol. 7, no. 1, juni 2010.
- R.P Smith, *Models of Military Expenditure*, *Journal of Applied Econometrics*, Vol. 4, No. 4, John Wiley & Sons, 1989.
- Rosyidah, Fitri, (2006), “ Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Perekonomian Kabupaten Majalengka 1988-2002”, Skripsi Sarjana (Tidak dpublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Rahayu, Sri (2011) , “Policy Paper : Outlook Penyerapan Belanja K/L 201”.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Thun 2004 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerj dan Anggaran Kementrian/Lemabaga (RKA-KL). Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- SIPRI Military Expenditure Database (BNN), 2011.
- Smith, A (1997). *An Inquiry into the Nature snd Causes of the Wealth of Nations*. London.
- Sukirno, Sadono. 2003. Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Stiglitz. E (1999), “Economics of the Public Sector Third Edition” Wahington D.C Fall 1999
- Todaro, M.P (1995), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid 1, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta
- Widarjono, Agus (2005), *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi*, Edisis Pertama, FE UII, Yogyakarta.

UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

